

Abstrak

Aset tetap merupakan komponen utama dari aset pemerintah sekaligus menjadi penunjang utama kegiatan operasional pemerintah sehari-hari, hal ini ditunjukkan dari penyajiannya yang signifikan dalam Neraca Pemerintah. Jumlahnya yang signifikan membuat aset tetap harus dikelola dengan baik, mulai dari pencatatan hingga pelaporannya guna menghasilkan informasi yang andal. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 menjadi pedoman umum untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pada seluruh instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah, secara khusus pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PSAP Nomor 07. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara masih melakukan kekeliruan pada penyajian nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap serta masih terdapat beberapa informasi yang pengungkapannya masih kurang jelas pada CaLK.

Kata kunci: aset tetap, PASP Nomor 07, akuntansi aset tetap, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Abstract

Fixed assets are the main component of government assets as well as the main support for daily government operational activities, this thing indicated by the significant amount in the Government's Balance Sheet. The significant amount makes fixed assets must be managed properly, from recording to reporting in order to produce reliable information. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Number 07 is a general guideline for regulating the accounting treatment of fixed assets in all government agencies. The purpose of this study was to determine the suitability of the application of accounting for fixed assets to Local Governments, specifically at the Plantation Department of Kutai Kartanegara Regency with PSAP Number 07. The data collection methods used in this study are literature study, interview, and documentation. The results of this study indicate that the application of fixed assets accounting at the Plantation Department of Kutai Kartanegara is still not completely appropriate with PSAP Number 07. The Plantation Department of Kutai Kartanegara Regency still made mistakes in presenting the value of depreciation expense and accumulated depreciation of fixed assets and there are still some informations which disclosure is still unclear in CaLK.

Keywords: *fixed assets, PSAP Number 07, accounting for fixed assets, Plantation Department of Kutai Kartanegara Regency.*